

ISSN-E: 2623-2065  
ISSN-P: 2684-8872

# SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

**Vol 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)**

Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru

*Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril*

Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan *Gemeente* Mojokerto Tahun 1918-1942

*Firmanda Dwi Septiawan*

Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir

*Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati*

Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia

*Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti*

Pola Insurgensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional

*Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri*

Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV

*Siti Khusnul Khotimah, Yuliati*

Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia

*Privera Ajeng Ersanda*

Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir

*Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril*

Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

*Ira Sugiarnik*

Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX

*Yohanes Purwanto*



# **Dewan Redaksi**

## **SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah**

### **Editor in Chief**

Risa Marta Yati, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

### **Section Editor**

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

### **Reviewer/Mitra Bestari**

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Kunto Sofianto, M.Hum., Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

### **Administrasi**

Viktor Pandra, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)

Dewi Angraini, M.Si. (Universitas PGRI Silampari)

### **Alamat:**

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: [jurnalsindang@gmail.com](mailto:jurnalsindang@gmail.com)

**SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH**  
**Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)**

	Halaman
Dewan Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	ii
1. Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru <i>Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril</i> .....	79
2. Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan <i>Gemeente</i> Mojokerto Tahun 1918-1942 <i>Firmanda Dwi Septiawan</i> .....	88
3. Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir <i>Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati</i> .....	98
4. Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia <i>Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti</i> .....	106
5. Pola Insurgensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional <i>Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri</i> .....	114
6. Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV <i>Siti Khusnul Khotimah, Yuliati</i> .....	128
7. Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia <i>Privera Ajeng Ersanda</i> .....	134
8. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir <i>Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril</i> .....	141
9. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi <i>Ira Sugiarnik</i> .....	150
10. Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX <i>Yohanes Purwanto</i> .....	164

## **PARTAI ISLAM DALAM PEMILU 1955: PILIHAN MASYARAKAT JAWA BARAT BERDASARKAN KAMPANYE PERTAMA DI INDONESIA**

**Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti**  
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia  
Alamat korespondensi: gianfajargemilang@upi.edu

Diterima: 30 April 2022; Direvisi: 30 Mei 2022; Disetujui: 15 Juni 2022

### **Abstract**

*A democratic state requires representation as a formal and procedural means of a government. The manifestation of the form of democracy in Indonesia that has only been formed a decade is the plan to carry out the first general election that will involve all the people. The election is planned as the number one idea of the state system as well as a step to prepare the draft and regulations of the legislation. Masyumi as the first Islamic party gained great support from various groups of people. After a conflict based on ideological differences between groups in Masyumi's body, slowly one by one Islamic organizations retreated and formed a political party that stood alone. NU who had split later founded a political party as a competitor of Masyumi. With a number of times not less, both were included in the top five political parties winning the 1955 election. Campaigning as a tool as well as communication of the political elite became very important in that period with a focus on the media as well as the message delivered. West Java region became an example of the success of the campaign conducted by Masyumi with the most votes among other political parties.*

**Keywords:** Election 1955, Islamic Party campaign, West Java, Masyumi, NU.

### **Abstrak**

Sebuah negara demokrasi memerlukan perwakilan sebagai cara formal dan prosedural dari sebuah pemerintahan. Manifestasi bentuk demokrasi dalam negara Indonesia yang baru terbentuk satu dekade yaitu adanya rencana untuk melaksanakan pemilihan umum pertama yang akan melibatkan seluruh rakyat. Pemilihan umum direncanakan sebagai gagasan nomor satu sistem tata negara juga sebagai langkah untuk menyiapkan rancangan dan peraturan dari undang-undang. Masyumi sebagai sebuah partai Islam yang pertama memperoleh dukungan yang besar dari berbagai golongan masyarakat. Setelah adanya konflik berdasarkan perbedaan ideologi antar kelompok dalam tubuh Masyumi, perlahan satu persatu organisasi Islam mundur dan membentuk sebuah partai politik yang berdiri sendiri. NU yang telah berpisah kemudian mendirikan partai politik sebagai pesaing dari Masyumi. Dengan jumlah masa yang tidak kalah banyak, keduanya masuk ke dalam lima besar partai politik pemenang pemilu 1955. Kampanye sebagai alat juga komunikasi elite politik menjadi sangat penting pada periode tersebut dengan fokus pada media juga pesan yang disampaikan. Daerah Jawa Barat menjadi sebuah contoh kesuksesan kampanye yang dilakukan oleh Masyumi dengan perolehan suara paling banyak di antara partai politik lainnya.

**Kata Kunci:** Pemilu 1955, Kampanye Partai Islam, Jawa Barat, Masyumi, NU.

### **A. Pendahuluan**

Sistem demokrasi sebagai pilihan dari beberapa negara di dunia menjadi sebuah alternatif bagi rakyat sebagai kesempatan penyelesaian masalah pribadi dalam kehidupannya yang diatur dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Sebagai sebuah sistem, negara yang menganut demokrasi harus menjamin rakyat untuk dapat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan dari fungsi negara. Dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah perwakilan (*indirect democracy, representative democracy*) sebagai cara formal dan prosedural sebuah pemerintahan. Partai politik di saat yang bersamaan juga muncul sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat juga wujud dari demokrasi.

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka telah menyiapkan dari jauh

sebagai negara yang akan menganut sistem demokrasi. Fenomena ini didasarkan atas alasan utama sejarah kelam pemerintahan kolonial Barat di Indonesia dan penolakan masyarakat untuk mengulang kembali peristiwa tersebut (Teik dalam Sonhaji & Maulida, 2020, hlm. 110). Manifestasi bentuk demokrasi lain dalam negara Indonesia yang baru terbentuk satu dekade ini salah satunya adalah rencana untuk melaksanakan pemilihan umum pertama yang akan melibatkan seluruh rakyat. Pemilihan umum dianggap sebagai langkah penting demokrasi perwakilan yang digunakan untuk menempatkan rakyat agar tetap memiliki hak kekuasaan atas diri mereka masing-masing. Permasalahan antar individu yang kompleks juga variatif menjadi fokus utama negara untuk selanjutnya dapat menentukan wakil dengan tujuan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas.

Pemilihan umum pertama di Indonesia dicanangkan sebagai rencana nomor satu dalam sistem tata negara juga sebagai langkah untuk menyiapkan rancangan dan peraturan dari undang-undang. Dalam pelaksanaan pemilihan umum para elite politik kerap menggunakan berbagai cara agar lawan dari partai yang mereka dukung menjadi sulit percaya terhadap lawan partai. Komunikasi antara elite politik dan rakyat menjadi sangat penting pada periode tersebut dengan fokus pada media juga pesan yang disampaikan. Penggunaan komunikasi pada masa sebelum pemilihan umum biasanya hanya bertahan tidak lama pasca kegiatan dilaksanakan karena sebenarnya komunikasi yang dilakukan hanya dipergunakan sebagai strategi bagi para tokoh politik untuk mengumpulkan masa demi mencapai kemenangan partai mereka.

Acara pemilihan umum 1955 menjadi puncak acara rakyat yang sebelumnya telah direncanakan jauh hari pasca kemerdekaan. Pengumuman kegiatan pemilihan telah sebelumnya diumumkan pada Oktober 1945 juga pembentukan partai politik pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Kampanye dinilai sebagai cara paling ampuh dalam melancarkan komunikasi politik antar partai guna mengukuhkan elektabilitas partai mereka dalam pemerintahan. Dari banyaknya partai politik yang mengikuti pemilu Masyumi menjadi satu-satunya partai politik bernuansa Islami dengan tujuan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat muslimin namun dalam perkembangannya perlahan pendukung Masyumi mundur dan mulai bermunculan partai bercorak Islam lain di antaranya NU, PSII, PPTI, dan AKUI (Romli, 2004, hlm. 22). Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penelitian ini hendak mengkaji mengenai bagaimana kampanye partai Islam dengan keputusan memilih masyarakat pada pemilihan umum 1955 dengan fokus pada wilayah administratif Jawa Barat dengan pertanyaan penelitian berupa (1) Bagaimana kampanye partai Islam pada pemilihan umum 1955 di Jawa Barat, (2) Bagaimana persaingan antara partai politik Islam di Jawa Barat pada pemilihan umum 1955, dan (3) Bagaimana pengaruh kampanye partai Islam pada pemilihan umum 1955 terhadap keputusan pilihan masyarakat Jawa Barat.

## **B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian historis dengan menggunakan metode sejarah sebagai dasar dari penelitian. Sjamsuddin (2007) menjelaskan setidaknya ada enam tahap utama yang

dihadapi peneliti dalam jenis penelitian sejarah yaitu 1) memilih topik yang sesuai; 2) mengusut evidensi (bukti) yang relevan dengan topik; 3) membuat catatan mengenai hal penting sesuai dengan topik penelitian; 4) mengevaluasi secara kritis evidensi yang ditemukan; 5) menyusun hasil penelitian pada satu pola sistematika yang ditentukan; 6) menyajikan dengan cara yang dapat menarik perhatian dan dapat dikomunikasikan kepada pembaca yang kemudian keseluruhan metode penelitian ini diklasifikasikan pada tiga langkah utama yaitu heuristik, kritik, dan historiografi. Poin 1 hingga 3 merupakan pola heuristik atau pengumpulan sumber, poin 4 merupakan kritik, dan poin 5 dan 6 merupakan historiografi.

### C. Pembahasan

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dari total keseluruhan 34 provinsi di Indonesia sangat kental dikenal dengan etnis Sunda nya . Terletak di bagian barat pulau Jawa dengan lebar sekitar 150-157 km dan panjang 265 km, wilayah Jawa Barat menjadi penopang dari ibu kota Jakarta dengan presentasi wilayah keseluruhan sekitar 27% dari pulau Jawa. Tidak mengherankan letaknya yang strategis memberikan banyak peluang baru bagi Jawa Barat

sebagai tempat pelaksanaan berbagai macam kegiatan mulai dari lokal, nasional maupun internasional. Letak Jawa Barat yang strategis juga didukung dengan kesuburan lahan dan vegetasi yang melimpah sebagai dampak dari endapan vulkanis gunung berapi di dalam wilayahnya. Fenomena ini kemudian membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk yang pesat. Dalam perkembangannya, provinsi Jawa Barat memiliki demografi penduduk yang melaju dengan cukup tinggi. Dengan luas sekitar 3.710.035 km.<sup>2</sup> wilayah ini memiliki jumlah penduduk 49.935.858 jiwa per tahun 2020 (BPS jabar.go.id).

Kepadatan penduduk masing-masing wilayah yang berbeda dapat menjelaskan bahwa pemerataan penduduk di daerah Jawa Barat masih belum merata, terlebih hal ini juga ditambah dengan urbanisasi masyarakat yang berasal dari provinsi lain ke Jawa Barat dengan berbagai tujuan yang kebanyakan menempati wilayah kota besar membuat pemerataan penduduk semakin sulit untuk dilakukan. Peristiwa ini kemudian sangat berdampak pada proses pemilihan umum terutama pada hak pilih masyarakat Jawa Barat.

Tabel 1.

#### Daftar pemilih tetap Pilkada serentak tahun 2018 daerah pilih Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018				
		Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Difabel
			L	P	Total	
1	Bandung	5.448	1.179.431	1.151.421	2.330.852	3.081
2	Bandung Barat	2.920	584.455	574.109	1.158.564	1.397
3	Bekasi	3.994	922.362	923.085	1.845.447	1.492
4	Bogor	7.635	1.688.275	1.606.550	3.294.825	2.160
5	Ciamis	2.263	458.015	462.843	920.858	4.767
6	Cianjur	3.921	840.398	813.407	1.653.805	1.841
7	Cirebon	3.650	822.972	813.021	1.635.993	1.876
8	Garut	4.719	915.896	885.730	1.801.626	2.688
9	Indramayu	2.841	654.832	664.113	1.318.945	2.488
10	Karawang	3.022	802.216	796.166	1.598.382	1.778

11	Kota Bandung	4.419	826.393	832.624	1.659.017	2.173
12	Kota Banjar	332	70.770	72.746	143.516	612
13	Kota Bekasi	3.030	713.848	720.869	1.434.717	1.024
14	Kota Bogor	1.785	338.072	336.238	674.310	828
15	Kota Cimahi	983	180.788	184.192	364.980	1.066
16	Kota Cirebon	579	113.843	116.603	230.446	728
17	Kota Depok	3.302	573.547	581.930	1.155.477	1.424
18	Kota Sukabumi	527	111.857	113.492	225.349	571
19	Kota Tasikmalaya	1.161	238.749	234.884	473.633	962
20	Kuningan	2.005	421.957	415.408	837.365	3.089
21	Majalengka	2.192	472.841	479.697	952.538	2.482
22	Pangandaran	717	154.051	157.125	311.176	1.451
23	Purwakarta	1.492	327.798	324.998	652.796	1.080
24	Subang	2.852	547.239	562.946	1.110.185	2.092
25	Sukabumi	4.118	908.542	893.450	1.801.992	2.962
26	Sumedang	2.026	415.751	418.525	834.276	1.771
27	Tasikmalaya	3.021	660.595	648.374	1.308.969	3.167
<b>Total</b>		74.954	15.945.49 3	15.784.54 6	31.730.03 9	51.050

(Sumber: infopemilu.kpu.go.id)

### Islam dan Kampanye Pemilu 1955

Kegiatan kampanye menjadi sebuah langkah utama para partai dan kontestan pada pemilu. Kampanye digunakan sebagai cara para politisi juga para kontestan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak memilih lawan politiknya juga sebagai langkah menghimpun massa. Herbert Feith (dalam Pamungkas, 2019, hlm. 57) menyatakan tahap pertama kampanye dalam pemilu 1955 dimulai pada 4 April 1953 ketika RUU Pemilu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 mengenai Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bersamaan dengan pemberitahuan tersebut masyarakat mulai menggelar kampanye dengan anggapan bahwa pemilu akan dalam waktu dekat dilaksanakan.

Tahap pemilu kedua diperkirakan mulai dilaksanakan pada tahun 1954, tepatnya pada 31 Mei ketika Panitia Pemilihan Indonesia mengesahkan gambar partai yang mengikuti pemilihan umum (Herbert Feith dalam Pamungkas, 2019; Permadi, 2014). Proses kampanye kemudian dilaksanakan kurang lebih selama dua

tahun dengan memperluas paham yang dianut masing-masing partai juga promosi calon pemimpin partai (Arestu, 2021, hlm. 40). Banyak ragam cara yang dilakukan masyarakat untuk berkampanye seperti pertemuan antara calon petinggi juga masyarakat di berbagai wilayah, orasi, dan cara unik lainnya.

Badan penyelenggara pemilihan sejak jauh hari telah direncanakan untuk dibentuk sebagai pengawas keberlangsungan pelaksanaan pemilihan dari pusat hingga daerah. Hingga akhirnya terbentuk sebuah badan pengawas dengan nama Badan Pembaruan Susunan Komite Nasional Pusat yang bertugas di lingkup pusat dan Cabang Badan Pembaruan Susunan Komite Nasional Pusat di lingkup daerah yang juga dikenal sebagai BPS yang dilantik oleh Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pada 16 September 1946. Setelah BPS terbentuk, presiden kemudian melantik anggota yang berjumlah 10 orang di Yogyakarta yang merupakan perwakilan politik juga wakil dari daerah. Sebagai bentuk dari pelaksanaan rencana pemilihan umum, cabang BPS kemudian dibentuk



dengan jumlah 33 cabang yang ditempatkan di masing-masing daerah karesidenan dengan jumlah anggota yang beragam dan ditujukan demi terselenggaranya pemilu (Muhadam & Teguh, 2015, hlm. 108–109).

Aturan Islam pada masyarakat Jawa Barat setidaknya telah tertanam sejak leluhur mereka menempati wilayah tersebut. Tidak bisa dipastikan kapan Islam masuk ke dalam struktur masyarakat namun menurut kepercayaan asli masyarakat Baduy, mereka menganggap bahwa leluhur mereka memiliki keterhubungan dengan Islam bahkan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dengan agama yang dianut adalah Sunda Wiwitan.

Kedatangan Islam ke Jawa Barat dalam versi lain dikatakan dibawa oleh Bratalegawa putra dari penguasa kerajaan Galuh, versi lain menyatakan bahwa Islam mulanya masuk dari daerah Karawang dengan bukti sebuah pesantren yang didirikan oleh Syekh Quro yang berasal dari negeri Campa, juga versi yang menyatakan bahwa Islam dibawa dari Arab oleh Syekh Nurjati (Rasyid, 2020). Kendati demikian perkembangan agama Islam di daerah Jawa Barat tersebar dengan sangat pesat, menyorot peranan Sunan Gunung Djati sebagai tokoh utama penyebar Islam di tatar Sunda.

Perkembangan Islam selanjutnya perlahan masuk ke dalam struktur sosial masyarakat. Pada era kebangkitan nasional organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan masa yang besar sangat besar. Dimulai dengan berdirinya organisasi Sarekat Islam yang memikat masyarakat untuk dapat memperjuangkan kemerdekaan dan menggugah jiwa politik di dalamnya. Akhirnya setelah Indonesia merdeka tercetus sebuah rencana untuk melakukan pemilihan umum sebagai

rangkaian “pesta rakyat” bagi negara penganut demokrasi.

Pemilihan umum pertama di Indonesia terbagi menjadi dua tahap pemilihan yaitu anggota DPR dan konstitusi yang dilaksanakan pada 29 September juga 15 Desember 1955. Dua partai utama dalam persaingan di daerah Jawa Barat yang memegang posisi penting dalam pemilihan umum, NU dan Masyumi menjadi kiblat pemilu bagi kaum muslimin. Sebagai wilayah yang mayoritas masyarakat beragama Islam, dukungan untuk kedua partai tersebut menjadi sangat besar dan kuat. Masyumi sebagai partai politik dengan pengikut yang paling banyak di seluruh Indonesia menamai diri mereka sebagai “Keluarga Besar Bulan Bintang” yang mengacu pada keseluruhan organisasi naungan mereka (Ayu & Sulistiyono, 2020, hlm. 34–35).

Partai Masyumi yang memiliki karakter populis mengambil suara rakyat dengan cara melihat simpati masyarakat dengan mengangkat fenomena keadilan sosial, mengangkat kewajiban Islam pada tatanan kenegaraan dan mengasosiasikan diri sejalan dengan umat muslim (Argenti, 2020). Proses kampanye juga dilakukan Masyumi dengan dukungan dari berbagai golongan dan masyarakat Islam dengan mencirikan Islam yang modern namun masih mencirikan kedaerahan masing-masing. Mobilisasi partai dilakukan dengan mengangkat isu yang berkaitan dengan ideologi komunis, dan paham sekuler Barat yang ada dalam diri kaum nasionalis. Langkah kampanye yang dilakukan Masyumi ini sangat bersinggungan dengan lawan partai politik lain pada pemilihan umum. Cara ini tentu dilakukan demi memaksimalkan suara masyarakat dan mengarah pada



masyarakat Islam yang menjadi mayoritas populasi.

Penafsiran simbol Islami juga cerita Nabi Muhammad digunakan sebagai cara mereka menampilkan dirinya sebagai penjaga iman kaum muslimin Indonesia dari pengaruh sekuler Barat. Propaganda anti komunis juga dilayangkan oleh Masyumi dengan anggapan mereka terhadap bentuk nyata praktik komunisme di Indonesia. Pemimpin partai yang sedang berseru menyuruh pimpinan partai lain, khususnya PKI untuk bisa kembali ke sumber doktrin dari paham mereka (Ayu & Sulistiyono, 2020, hlm. 35). Masyumi beranggapan kompromi antara agama dan komunis bukanlah sesuatu yang memungkinkan dilaksanakan dalam sistem kenegaraan, terlebih usulan perubahan sila pertama Pancasila oleh PKI yang lebih memilih kebebasan beragama dan menjadi langkah mula kebebasan propaganda anti-agama membuat Masyumi tidak menyetujui kampanye PKI dan menentangnya dengan doktrin mereka sendiri.

Sebagai lawan politik, NU memulai kampanye dengan mengumpulkan penyiar agama di berbagai daerah juga strategi pengajian dilaksanakan untuk meraih masyarakat yang menganut Islam tradisional dengan selipan doktrin masuk surga dan merupakan *jihad fi sabilillah* jika mereka memilih NU dalam pemilu (Ilman & Nugroho Aji, 2020). Para pendukung NU juga menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti dakwah juga pengajian yang menasar pemilih baik dari internal organisasi maupun eksternal. Kegiatan dakwah yang disebarkan oleh organisasi tidak hanya berupa ajakan untuk berbuat baik saja namun juga berkaitan dengan beberapa isu dan permasalahan

masyarakat khususnya masalah mengenai perempuan, kemaksiatan, dan perbuatan menyimpang lainnya (Ilman & Nugroho Aji, 2020). Selain itu kampanye NU juga diselengi dengan kegiatan amal berupa khitan masal, penggalangan dana bagi para fakir miskin atau yang terkena bencana, hingga langkah penghijauan kembali dilakukan oleh para pendukung. Namun demikian kampanye yang dilakukan oleh NU nyatanya kalah kuat dengan strategi kampanye yang dilaksanakan Masyumi. Kurangnya jangkauan partai pada basis pendukung utama di daerah pedesaan menjadi kendala utama dari kampanye ini, termasuk kiai yang lebih memilih Masyumi sebagai partai Islam paling besar di Indonesia (Sujati, 2020, hlm. 114).

Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk beragama muslim sama seperti mayoritas wilayah lainnya sulit melepaskan paham keagamaan, unsur kedaerahan, dan nasionalisme dalam perkembangan politiknya. Empat partai utama pemegang kekuasaan politik di daerah Jawa Barat yaitu Masyumi, PNI, PKI, dan NU menjadi gambaran bagaimana pola politik masyarakat pada pemilu 1955. Dalam jumlah presentasi perolehan suara, Masyumi menempati urutan pertama dengan total 26,5% suara, diikuti dengan PNI sebanyak 22,1%, PKI sebanyak 10,9%, dan NU sebanyak 9,7% (Rasyid, 2020). Hal yang menarik di sini adalah adanya aspek keislaman dan rasa nasionalis sekuler yang kuat pada masyarakat Jawa Barat tercermin pada terpilihnya Masyumi sebagai partai politik bercorak Islam dengan suara terbanyak, dan PNI juga PKI sebagai partai nasionalis pada pemilu pertama Indonesia.

**Tabel 2.**

**Urutan perolehan suara terbanyak pemilihan umum di daerah Jawa Barat**

Nomor	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Masyumi	26,5%
2	PNI	22,1%
3	PKI	10,9%
4	NU	9,7%
5	PSII	5,7%
6	Perti	5,7%

(Sumber: Rasyid, 2020, hlm. 87)

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menggunakan sistem multipartai, menjadikan ideologi sebagai nilai jual dalam kampanye juga proses politik pada masa tersebut. Herbert Feith (dalam Muhadam & Teguh, 2015, hlm. 89) setidaknya telah menjelaskan lima aliran besar ideologi partai politik pada pemilu 1955, yaitu

1. Nasionalisme Radikal
2. Tradisionalisme Jawa
3. Islam
4. Sosialisme Demokratis
5. Komunisme

Masing-masing dari ideologi ini diperkenalkan oleh partai politik kepada masyarakat sebagai langkah mendongkrak eksistensi partai juga evaluasi terhadap tatanan kenegaraan yang telah dirumuskan sebelumnya. Potensi konflik dapat sangat besar kemungkinannya terjadi dikarenakan ideologi yang dibawa partai politik tersebut memiliki jarak yang cukup jauh. Laporan akhir mengenai intimidasi terhadap para calon pemilih kemudian berdatangan dari seluruh Indonesia. Pada daerah wilayah Jawa banyak laporan mengenai intimidasi yang dilakukan oleh para lurah PNI dan para bawahan mereka dengan tingkat rendah oleh para komunis penjaga keamanan desa. Selain itu intimidasi dirasakan masyarakat Jawa Barat dan Aceh ketika hendak memilih Masyumi dengan Darul Islam sebagai pengecoh utama. Pemilu selanjutnya kampanye dengan

intimidasi dirasa sudah kurang intensitasnya karena banyak di antara mereka menyatakan pemilihan Konstituante akan lebih penting dibandingkan dengan Parlemerter (Permadi, 2014, hlm. 61-62).

#### **D.Kesimpulan**

Kampanye sebagai langkah politik partai demi mendapatkan suara menjadi pilihan utama dalam strategi menuju pemilihan umum. Daerah Jawa Barat dengan ciri khas masyarakat mayoritas muslim dan kedaerahan juga nasionalisme yang kuat membuat bentuk kampanye menjadi beragam. Partai Islam yang dikuasai dua pemegang kekuasaan utama yaitu Masyumi dan NU juga memiliki cara tersendiri dalam mengambil suara rakyat. Masyumi sebagai partai Islam pertama yang maju dalam pemilihan umum memiliki jumlah masa juga organisasi bawahan yang cukup banyak dibandingkan dengan NU. Kesempatan ini digunakan secara baik oleh partai dan menjadikan mereka sebagai partai dengan jumlah pemilih tertinggi di Jawa Barat.

Lawan politiknya, NU sebagai partai yang sama-sama berideologikan Islam memiliki strategi lain untuk mengundang suara menuju partainya. Kampanye dengan corak kemasyarakatan banyak dilakukan oleh partai salah satunya ajakan berbuat baik dan mengangkat permasalahan umum yang ada seperti kemaksiatan, perbuatan menyimpang, kegiatan amal, hingga khitan masal. NU dengan fokus pada Islam tradisional mulai berfokus

mencari suara dari struktur sosial paling rendah, dimulai dari keluarga hingga pemerintahan berbeda dengan Masyumi yang berfokus pada Islam modern dengan bantuan para kiai juga ahli agama.

Kemenangan empat partai utama yaitu Masyumi, PNI, PKI dan NU pada pemilu 1955 di Jawa Barat mencirikan politik Indonesia khususnya Jawa Barat yang didasarkan atas masyarakat yang masih dipengaruhi faktor *sosiologis-kultural* (Rasyid, 2020). Identifikasi perilaku politik masyarakat dengan adanya sosialisasi sangat lama yang sebagian besar terpengaruh dari orang tua pada saat memilih berusia muda dan lingkungan ketika mereka beranjak dewasa menjadi faktor utama kemenangan partai dalam pemilihan umum 1955. Identifikasi partai kemudian muncul sebagai produk "kampanye" partai sejak dini pada calon memilih didasarkan atas cerminan lingkungan dan sosialisasi dari sepanjang hidup calon memilih.

### Daftar Referensi

Arestu, T. D. (2021). *Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Pertama di Indonesia*. 3(1).

Argenti, G. (2020). Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. *Politikom Indonesiana*, 5(July).

Ayu, A. K., & Sulistiyono, S. T. (2020). *Masyumi 's Campaign Strategies in the 1955 Election in Jakarta*. 3(2), 32-41.

Ilman, Z., & Nugroho Aji, T. (2020). Partisipasi Politik Muslimat Nu Dalam Pemilu Tahun 1955 Dan 1971. *Avatara*, 9(1).

Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Teori, Konsep dan Strategi. *Rajawali Pers*, 1, 14, 22. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>

Pamungkas, M. (2019). *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Permadi, S. B. (2014). *Proses Pemilihan*

*Umum 1955 di Indonesia*.

Rasyid, F. A. (2020). PASANG SURUT PARTAI-PARTAI ISLAM DI JAWA BARAT PADA PEMILU 1955-2004. In *Encephale* (Vol. 53, Issue 1). CV. Sentra Publikasi Indonesia.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>

Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1 (1), 29-48. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/370/218>

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak.

Sonhaji, M., & Maulida, F. H. (2020). Political Communication and the Tendency of the Santri and Abangan Party Preferences in The 1955 Elections. *NYIMAK: Journal of Communication*, 4(1). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak>

Sujati, B. (2020). Dinamika Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 1955 di Jawa Barat. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6138>